

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 24
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : 1. Pembahasan LKPP Kementerian Kehutanan TA
2025 (Dalam rangka pembahasan UU P2 APBN TA.
2025); dan
2. Isu aktual Kehutanan.
Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. (Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKS) didampingi oleh Siti
Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR
RI/FPGerindra), dan Ahmad Yohan, M.Si. (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-PAN)
Sekretaris Rapat : Andri Suryanta, S.IP. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Rohmat Marzuki S.Hut. (Kuasa Menteri
Kehutanan/Wakil Menteri Kehutanan);
2. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Sekretaris Jenderal
sekaligus Plt. Inspektur Jenderal);
3. Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
(Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Kehutanan);
4. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan);
5. Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP (Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari);
6. Catur Endah Prasetyani P, S.Si,M.T (Direktur
Jenderal Perhutanan Sosial);
7. Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si. (Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan);
8. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut.,
M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem); dan

9. drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan, dalam rangka Pembahasan LKPP Kementerian Kehutanan TA 2025 (Dalam rangka pembahasan UU P2 APBN TA. 2025) dan Isu aktual Kehutanan dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKS) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Wakil Menteri Kehutanan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 terkait Kementerian Kehutanan.
2. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan menyepakati poin keputusan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara tuntas, terukur, dan tepat waktu.
 - b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta penerimaan negara sektor kehutanan.
 - c. Meningkatkan penanganan isu aktual kehutanan secara terpadu, meliputi penguatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penataan penerbitan persetujuan unit karbon, penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi, serta penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan terhadap kepentingan negara serta masyarakat.
 - d. Segera menerbitkan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus selambat-lambatnya 14 hari sejak Rapat Kerja hari ini.
 - e. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2026, terkait dengan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan (PUSPEH) sampai dengan kajian atas PUSPEH tersebut diterima dan disetujui oleh Komisi IV DPR RI.
 - f. Menyempurnakan proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) lebih transparan dan efisien.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

a.n Menteri Kehutanan
Wakil Menteri Kehutanan,

Ttd.

Rohmat Marzuki S.Hut.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.
A-466